

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN INFLASI
DI INDONESIA**

NOPIRIN

Universitos Godjah Mada

ABSTRACT

This paper begins with a theoretical discussion on the causes of inflation. Inflation can occur as a result of rising aggregate demand (demands pull inflation) and upward shifting aggregate (costs push inflation).

Aggregate demand consist of household expenses, government expenses and net export, whereby those components are transformed as a result of monetary and finance policies, and balance of payment Inflation occurs when rising aggregate demands are not followed by rigidities in aggregate supplies.

Budget deficits that are paid by printing of currencies without equal response from production will increase pressure for inflation. Deficit of balance of payment will lead to depreciation of domestic currency, which in the case of high volume of import industry will lead to rising pressure for inflation. Inflation pressure can also be caused by the increasing in aggregate supplies, as a result of rising production costs.

Indonesia's experience in overcoming inflation began with the phenomenon of uncontrolled inflation in the Old Order, where national budget deficit was financed by loans from Bank Indonesia.

During the New Order, high inflation is overcome by the initiation of balanced budget programs and by encouraging production. The government stimulates foreign and domestic investment, as shown by the formulation of UUPMA and UUPMDS in 1968. Besides monetary policies to counter inflation, the government also revives aggregate supplies by deregulating the production sector.

Terlebih dahulu akan diuraikan secara konseptual upaya penanggulangan inflasi, kemudian pelaksanaannya di Indonesia.

Sebelum kebijakan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi. Karena inflasi itu merupakan proses kenaikan harga-harga umum, dimana harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat, maka inflasi dapat disebabkan oleh permintaan dan atau penawaran agregat, Apabila laju pertumbuhan permintaan agregat melebihi laju pertumbuhan penawaran agregat akan timbul inflasi yang didorong oleh permintaan (demand pull inflation) dan sebaliknya cost push inflation. Perkembangan permintaan agregat ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, pertama moneterperbankan, kedua : pemerintah (fiskal) dan luar negeri (neraca pembayaran). Sedangkan penawaran agregat dipengaruhi oleh : Sumber daya manusia, tehnologi dan sumber daya lainnya. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya dapat menaikkan biaya produksi sehingga dapat menggeser penawaran agregat ke atas (cost pust inflation).

Permintaan agregat yang terdiri dari pengeluaran rumah tangga (konsumsi). investasi, pengeluaran pemerintah dan sektor luar negeri (ekspor dikurang impor) dapat berubah sebagai akiba pengaruh kebijakan moneter, fiskal dai neraca pembayaran. Kebijakan monete dan kredit yang bersifat ekspansip akan mendorong permintaan agregat naik Apakah disektor penawaran agrega terdapat ketegaran (rigidities) tekanai inflasi akan muncul.

Demikian pula kebijakan fiskal yang ekspansip yang tidak diiringi dengan respons produksi yang seimbang akan menimbulkan tekanan inflasi ; lebih-lebih apabila anggaran belanja yang defisit dibiayai dengan pencetakan uang. Apabila defisit ini dibiayai dengan pinjaman luar negeri dampak inflasinya relatip kecil karena sangat tergantung dari pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri tersebut. Apabila difisit tersebut dibiayai dengan pinjaman dalam negeri (misalnya dengan mengeluarkan obligasi) akan cenderung menimbulkan apa yan disebut "*crowding aut*". Kebijakan balance-budget akan dapat mengerem laju inflasi

dan secara konseptual rnsasi mampu mendorong perekonomian. Posisi neraca pembayaran yan semakin rawan (defisit) cenderung memperlemah matauang dalam nege (depresiasi) sehingga menaikkan harga barang impor. Apabila komponen impor industri dalam negeri besar maka akan mendorong kenaikan biaya produksi sehingga tekanan inflasi semakin besar (imported inflahon).

Upaya untuk menganggulangi inflasi tentunya hams mencakup baik dari sisi permintaan maupun penawaran agregat yang meliputi kebijakan moneter, fiskal, kurs valuta asing, produksi dan distribusi, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya serta teknologi.

Dengan menggunakan instrumen sederhana kurva permintaan dan penawaran agregat berikut ini, dapat dianalisis sebab serta penanggulangan inflasi.

Apakah ekspansi permintaan agregat dan AD_0 ke AD_1 dapat menimbulkan inflasi atau tidak sangat tergantung pada kondisi penawaran agregat (AS). Apabila faktor produksi sudah digunakan sepenuhnya (full employment) seperti tercermin pada AS_{00} maka hasilnya adalah inflasi yang tinggi. Sebaliknya jika masih terdapat banyak pengangguran faktor produksi (seperti AS_2) maka inflasi permintaan agregat tidak akan menimbulkan inflasi. Dalam hal ini elastisitas penawaran agregat sangat menentukan pengaruh ekspansi permintaan agregat terhadap harga (dan output). Inflasi dapat pula timbul kalau terjadi pergeseran ke atas kurva AS. Pergeseran kurva AS ke atas dapat timbul karena naiknya biaya produksi, misalnya kenaikan upah atau harga bahan pembantu/bakar.

Sebelum mengulas kebijakan penanggulangan inflasi, ada baiknya dibedakan dulu apakah inflasi yang terjadi tersebut dapat diantisipasi oleh masyarakat (anticipated inflation) atau tidak (unanticipated inflation).

Dalam hal inflasi dapat diperkirakan maka kepurusan ekonomi masyarakat akan memasukkan perkiraan perubahan harga. Hal ini terjadi apabila masyarakat menggunakan semua informasi yang terkait dengan inflasi dengan efisien untuk membuat perkiraan tentang inflasi (retional expectation). Sebaliknya inflasi yang tidak dapat diperkirakan dapat timbul apabila inflasi sebelumnya terjadi dengan

tingkat fluktuasi yang tajam sehingga masyarakat sukar memperkirakannya. Akibat jelek yang timbul dari unanticipated inflation terutama adalah dalam distribusi pendapatan dari kreditur kepada debitur. Jika masyarakat yang memberi pinjaman kepada produsen (misalnya pembelian surat obligasi yang diterbitkan oleh pengusaha) maka redistribusi kekayaan akan bergerak dari masyarakat kepada pengusaha.

Kebijakan penanggulangan inflasi tergantung sumber penyebab inflasi. Apabila inflasi timbul dari sisi permintaan agregat, maka pengendaliannya dapat dilakukan misalnya melalui pengetatan moneter, fiskal dan kebijakan kurs yang realistis (yang menunjukkan dengan pergeseran ke kiri bawah AD_1 ke AD_0). Namun jika situasi ekonomi terdapat banyak pengangguran sumber daya (AS_2), maka pengetatan moneter atau fiskal justru akan memperparah pengangguran (resesi). Penanggulangan inflasi dapat pula dilakukan melalui peningkatan penawaran agregat (menggeser AS kekanan bawah). Salah satu kebijakan sisi penawaran yang populer adalah penurunan pajak (supply side economic). Dengan penurunan pajak diharapkan dapat mendorong masyarakat kerja keras, menabung lebih banyak dan demikian investasi yang lebih besar, sehingga produksi naik dan inflasi dapat ditekan.

Kebijakan lain adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, misalnya melalui pendidikan dan latihan untuk SDM, penerapan teknologi modern, serta peningkatan riset dan pengembangan (R & D). Dalam terminologi kurva phillip, upaya ini akan menggeser natural rate of unemployem "ke kanan".²⁾

Disamping itu semua kebijakan penanggulangan inflasi dapat melalui perbaikan pola distribusi & perdagangan serta impor apabila kelangkaan barang terjadi. Distribusi barang dalam negeri yang tidak lancar serta kelangkaan barang (karena panen gagal misalnya) dapat mendorong harga naik.

Sistem pengendalian harga yang baik serta indeksing dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh negatif dari inflasi. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk upah/gaji. Kalau indeks harga naik, maka upah gaji juga dinaikkan.

Pengalaman Indonesia

Penanggulangan inflasi merupakan upaya keras yang selalu harus dilakukan karena inflasi yang tinggi akan mengganggu pembangunan nasional. Kebijakan baik dari sisi permintaan maupun penawaran yang telah diambil oleh Pemerintah meliputi antara lain : kebijakan moneter, fiskal, kurs, perdagangan, sumber daya dan teknologi.

Kebijakan Moneter

Pada masa Orde Lama kebijakan moneter bersifat langsung. Penguasa moneter mengendalikan sektor moneter secara ketat, sehingga tidak ada fleksibilitas sama sekali di sektor perbankan. Perbankan lebih bersifat kepanjangan tangan dari Pemerintah.

Sebagai akibat kebijakan defisit anggaran belanja negara yang ditutup dengan pinjaman dari Bank Indonesia maka inflasi menjadi tidak terkendali (mencapai 635% pada tahun 1966). Pertumbuhan produksi dapat dikatakan nihil. Keadaan perekonomian mengalami stagnasi.

Orde Baru memperoleh warisan keadaan ekonomi yang demikian itu kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengatasi. Menyadari bahwa sumber inflasi itu terutama berasal dari defisit anggaran belanja maka Pemerintah Orde Baru mencanangkan program stabilitasi melalui anggaran belanja berimbang. Dengan prinsip anggaran belanja berimbang ini jumlah uang beredar dapat terkendali. Untuk mendorong produksi Pemerintah menggalakkan investasi baik dari luar maupun dalam negeri dengan disusunnya UUPMA dan UUPMDN pada tahun 1968. Disamping itu untuk menata kehidupan perbankan disusun UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serta UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia.

Investasi baik dari luar maupun dalam negeri meningkat sehingga produksi barang bertambah. Disatu sisi jumlah uang terkendali melalui anggaran berimbang, di sisi lain produksi barang meningkat maka akibatnya tingkat inflasi dapat terkendali. Inflasi menurun dari 635% tahun 1966 menjadi 10% pada tahun 1969 dan bahkan tinggal 2,5% pada tahun 1971. Program stabilitas dapat dikatakan berhasil.

Pada tahun 1973/1974 harga minyak meningkat hampir 4 kali lipat. Penerimaan negara meningkat sehingga kredit likuiditas pun naik ($\pm 58\%$). Akibatnya jumlah uang beredar bertambah ($\pm 48\%$) sehingga tingkat inflasi naik lagi ($\pm 47\%$). Untuk mengekang inflasi ini Bank Indonesia mengenakan pagu kredit perbankan. Ternyata dengan kebijakan ini laju inflasi dapat ditekan menjadi 9,8%. Namun pagu kredit tersebut menyebabkan Bank-Bank kelebihan likuiditas dan ini mendorong mereka menanamkan dalam bentuk valuta asing. Kelebihan likuiditas ini terutama dialami oleh Bank-Bank Pemerintah dikarenakan adanya ketentuan bahwa dana dari BUMN harus di tempatkan pada Bank Pemerintah.

Tahun 1981/1982 ekonomi dunia mengalami kelesuan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak-seimbangan perdagangan antar negara maju. Amerika mengalami double defisit, yakni dalam anggaran belanja serta neraca pembayaran. Akibatnya muncul gerakan proteksi. Resesi dan proteksionisme ini merupakan hambatan bagi ekspor Indonesia. Di samping ini, masalahnya diperberat lagi oleh adanya ekonomi biaya tinggi yang menghinggapi perekonomian Indonesia pada masa itu. Efisiensi produksi yang rendah sebagai akibat kebijakan perlindungan yang berupa non tarif merupakan salah satu sebab tingginya biaya produksi sehingga memperlambat daya saing di pasar internasional.

Kelesuan ini mengakibatkan dana pemerintah untuk pembangunan ekonomi menjadi terbatas. Menghadapi situasi yang demikian ini Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan penyesuaian diantaranya devaluasi, penjadwalan proyek dan yang paling penting adalah deregulasi perbankan 1 Juni 1983. Semenjak deregulasi ini pengaturan jumlah uang beredar tidak lagi secara langsung melalui pagu kredit, kredit likuiditas serta penetapan tingkat bunga, tetapi lebih bersifat tidak langsung, yakni melalui politik pasar terbuka, fasilitas diskonto serta cadangan minimum. Politik pasar terbuka dilakukan dengan menggunakan SBI dan SBPU yang diintrodusir tahun 1982/1985 sedangkan fasilitas diskonto (I dan II) untuk membantu mengatasi kesulitan likuiditas dikarenakan adanya mismatch dalam pengaturan dana oleh perbankan. Cadangan minimum semenjak tahun 1988 diturunkan dari 15% menjadi

2%. Pengaturan jumlah uang secara tidak langsung ini mendorong perkembangan sektor moneter menjadi lebih sehat.

Sasaran yang hendak dicapai dengan deregulasi tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian perbankan, meningkatkan peranan swasta serta mencegah terjadinya arus modal ke luar negeri. Isi pokok deregulasi adalah penghapusan pagu kredit perbankan, pembebasan penentuan tingkat bunga (kecuali kredit prioritas bunganya masih ditentukan oleh B.I) serta penurunan kredit likuiditas (hanya untuk program-program prioritas saja).

Dampak deregulasi yang dapat diamati antara lain: pertama mobilisasi dana masyarakat oleh perbankan meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya deposito yang dapat dihimpun serta kredit yang disalurkan, rata-rata sebesar 25% dan 21% antara tahun 1983-1989. Kedua; terjadi pergeseran dalam deposito, yakni dari deposito yang berjangka panjang menjadi pendek. Proporsi deposito berjangka 24 bulan turun dari 40% tahun 1983 menjadi 6,7% pada tahun 1994 sedangkan proporsi deposito berjangka 1 sampai 6 bulan terhadap total deposito meningkat dari 12% tahun 1983 menjadi 45% tahun 1994. Hal ini mencerminkan kepekaan masyarakat terhadap perubahan perekonomian yang terjadi. Masyarakat telah lebih rasional dalam mengelola dananya karena seringkali terjadi perubahan, oleh karena itu mereka lebih menyukai deposito berjangka pendek sebab lebih mudah disesuaikan dengan bentuk portofolio yang lain. Namun bagi pihak perbankan pergeseran ini tentu lebih menyulitkan pengelolaan dananya. Sangat sukar bagi perbankan untuk mengalihkan dari kredit jangka panjang menjadi pendek. Ketiga; tingkat bunga cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tingkat bunga ini disatu pihak dapat mendorong penggalan dana masyarakat serta mencegah larinya dana keluar negeri, tetapi bagi pengusaha tingginya tingkat bunga dapat mengurangi gairah investasi. Usaha Pemerintah untuk mengekang laju kenaikan tingkat bunga dilakukan secara tidak langsung yakni melalui penentuan tingkat diskonto SBI dan SBPU (hanya sampai tahun Pakto 1988). Usaha ini cukup berhasil, namun tahun 1986 harga minyak mengalami penurunan sehingga Pemerintah mengambil tindakan devaluasi, sehingga

usaha menekan tingkat bunga agak terhambat. Awal tahun 1987 terdapat tanda-tanda yang cukup menggembirakan, harga minyak dan ekspor non migas naik sehingga Pemerintah be rani mengendoran likuiditas. Namun sebagai akibat perubahan ekonomi dunia, misalnya terjadinya pergeseran nilai Yen dan Dollar, proteksi negara maju dan resesi maka pengendoran likuiditas tersebut ternyata digunakan untuk spekulasi. Kekhawatirn Pemerintah akan terjadinya arus modal ke luar negeri terpaksa diambil tindakan menaikkan tingkat diskonto SBI dan SBPU dan fasilitas diskonto serta penarikan dana beberapa BUMN (Gebrakan Sumarlin). Tindakan spekulatif dapat dipatahkan.

Pada tahun 1988 keadaan ekonomi Indonesia membaik. Pemerintah melanjutkan deregulasi dengan dikeluarkanya paket 27 Oktober 1988. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan mobilisasi dana, mendorong ekspor non migas, meningkatkan efiseindi perbankan serta pengembangan pasar modal. Isi paket tersebut adalah :

- a) Menurunkan cadangan minimum dari 15% menjadi 2% (termasuk deposito berjangka dan tabungan dikenakan cadangan wajib ini).
- b) Kemudahan dalam mendirikan bank baru serta mendorong bank-bank untuk meluncurkan produk-produk baru.
- c) Memperingan syarat pendirian bank devisa.
- d) Memperbolehkan pendirian bank campuran dan cabang bank asing di luar Jakarta.
- e) Sebagian dana BUMN dapat ditempatkan pada bank swasta dan LKBB
- f) Menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada debitur group (legal lending limit)
- g) Transaksi seap diperpanjang dari 6 bulan menjadi 3 tahun serta preni ditentukan atas dasar selisih bunga dposito dengan LIBOR.
- h) Pembatasan posisi devisa neto (selisih antara aktiva dangan pasiva valas) sebesar 25% dari modal sendiri.

Pakto 88 tersebut ternyata dapat mendorong perkembangan perbankan. Produk-produk perbankan baru bermunculan, misalnya berbagai macam bentuk

tabungan, ekspansi kredit serta kartu kredit. Di samping itu jumlah bank dan kantor bank meningkat dengan pesat, yakni masing masing sebanyak 111 dan 1879 pada bulan Maret 1989 naik menjadi 151 dan 2841 pada bulan Maret tahun berikutnya. Apabila BPR dimasukkan jumlah tersebut menjadi 7971 dan 10.664 pada bulan Maret 1990.

Kebijakan deregulasi perbankan tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Januari 1990 guna mendorong di arah kemandirian serta mencapai sasaran pemerataan. Dalam Paket Januari 1990 ini kredit likuiditas B.I (KLBI) secara bertahap dikurangi dan hanya diberikan untuk pengadaan pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi. Perbankan diwajibkan paling tidak 20% kreditnya tersalur untuk usaha kecil (KUK).

Dari serangkaian kebijakan Pakto 88 dan Pakjan 1990 tersebut membawa dampak meningkatnya likuiditas serta mobilisasi dana masyarakat. Kredit perbankan melonjak dengan pesat dari sebesar Rp. 54.241 milyar pada bulan Desember 1988 menjadi Rp. 93.372 milyar pada bulan April 1990.

Kenaikan aktivitas perbankan ini tentu saja akan mendorong likuiditas masyarakat meningkat sehingga permintaan agregat naik. Di samping itu naiknya investasi luar negeri serta perkembangan pasar modal semenjak 1989 telah memberi andil dalam peningkatan permintaan agregat. Ternyata sektor riil {produksi dan perdagangan) tidak mengikuti secara proporsional sehingga akibatnya tingkat inflasi meningkat. Naiknya tingkat inflasi ini didorong pula oleh kebijakan-kebijakan penyesuaian seperti misalnya kenaikan gaji, kenaikan harga BBM, tarif listrik di samping inflasi luar negeri yang timbul sebagai akibat krisis Teluk. Kekhawatiran Pemerintah akan inflasi ini telah melahirkan kebijakan moneter ketat yang berakibat tingkat bunga naik sehingga investasi dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi lebih lamban. Namun dari sisi neraca pembayaran, rendahnya tingkat inflasi dapat mempertinggi daya saing di pasar luar negeri sehingga ekspor meningkat. Di sisi lain naiknya tingkat bunga riil dapat mendorong masuknya dana dari luar negeri sehingga posisi neraca pembayaran tidak rawan.

Usaha BI untuk menekan laju inflasi di bawah dua digit didasari pada perkiraan bahwa apabila inflasi mencapai lebih dari 10% efeknya jauh lebih buruk dibanding dengan lambannya pertumbuhan dikarenakan naiknya tingkat bunga. Pengendalian inflasi dengan pengetatan likuiditas ini hanya akan mempengaruhi sisi permintaan saja. [nflasi yang terjadi ternyata juga berasal dari sisi penawaran (cost push). Untuk mendorong sisi penawaran ini perlu upaya deregulasi di sector produksi/pengadaan barang (sector riil) diteruskan. Langkah awal telah dimulai seperti misalnya diperbolehkannya impor semen maupun truk. Si samping itu, dengan dianutnya sistim devisa bebas perbankan dapat mencari data dari **luar** negeri guna membiayai produksi sehingga jumlah barang meningkat.

Mulai awal tahun 1992 pengendalian likuiditas mulai dilakukan. Mengingat ekonomi mudah memanas maka pemerintah melakukan kebijakan hati-hati (prudential banking) hingga memanasnya perekonomian ini terutama disebabkan oleh ketegaran pada sisi penawaran agregat sebagai akibat adanya kelangkaan prasarana dan sarana. Dalam gambar diatas tercermin pada kurva AS yang mendekati vertikal. Pertumbuhan permintaan yang menguat semenjak 1994 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi- Peningkatan konsumsi dikarenakan kenaikan gaji, UMR, penurunan tingkat pajak. Disamping itu pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai $\pm 26\%$ per tahun telah mendorong ekspansi permintaan agregat dan apabila tidak diikuti kenaikan penawaran agregat, harga-harga akan naik dan mengancam neraca pembayaran. Arus globalisasi menambah sulitnya pengelolaan moneter didalam negeri. Oleh karena itu Bank Indonesia kemudian melakukan kebijakan moneter hati-hati baik melalui ketentuan LDR, 3 L, kenaikan cadangan minimum menjadi 3% serta himbauan (moral suasion) kepada dunia perbankan.

Aliran modal masuk dari LN telah pula mempersulit kebijakan moneter, lebih-lebih yang sifatnya spekulatif. Untuk mencegah ini Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Bank Sentral Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Thailand. Demikian pula telah ditandatangani stand by loan. Dengan inflasi pada tingkat 8,63% pada tahun 1995.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan balance budget yang dinamis telah nyata dapat menekan laju inflasi, sehingga perlu dilanjutkan. Reformasi sistem perpajakan 1983 dan dilanjutkan dengan 1994 telah mampu meningkatkan penerimaan negara. Yang perlu pula dilanjutkan adalah upaya peningkatan efisiensi dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Alokasi dana pembangunan untuk prasarana sangatlah tepat, mengingat prasarana merupakan salah satu penyebab ketegaran disisi penawaran agregat. Dan tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan hutang luar negeri dan manajemennya yang baik.

Kebijakan Kurs

Sistem devisa bebas perlu terus dipertahankan karena telah mampu menjadi salah satu faktor pendorong aliran modal masuk. Demikian pula sistem kurs mengambang terkendali dengan menjaga kurs selaku realistis terus diupayakan. Deregulasi di sektor perdagangan dengan memperlancar arus barang serta perubahan dari non tarif menjadi tarif sedikit banyak telah membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran. Namun akhir-akhir ini (tahun 1995) defisit transaksi berjalan membengkak yang mengundang kerawanan. Oleh karena itu perlu upaya ekstra keras untuk memperbaiki dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan kebijakan ekonomi hati-hati dan cadangan devisa yang cukup ($\pm 5H$ bulan impor) gejolak kurs akan dapat dikendalikan.

Kebijakan Sisi Penawaran

Kebijakan pengendalian inflasi, terutama pada PJP I dapat dikatakan berhasil. Pengendalian harga bahan makan, terutama beras yang dilakukan oleh BULOG telah nyata mampu mengendalikan inflasi. Bobot beras dalam IHK cukup besar ($\pm 7,5\%$). Sehingga perubahan harga beras akan besar pengaruhnya terhadap inflasi. Ini terjadi pada tahun 1995 yang lalu dimana terjadi panen gagal. Kenaikan harga beras ini

diikuti pula oleh kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat melonjaknya kredit ke sektor properti.

Kelancaran distribusi akan sangat membantu pengendalian inflasi. Koordinasi terus digiatkan. Distorsi didalam pasar sebagai akibat monopoli perlu dihapus.

Pengumuman Pemerintah mengenai kenaikan tarif listrik otomatis sekali dalam tiga bulan dan kenaikan UMR tahun 1996 akan mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap inflasi (*anticipated inflation*) sehingga kurva penawaran agregat naik ke atas. Inflasi dapat terjadi lebih dahulu. Oleh karena itu sesuai dengan hipotesis *rational expectation*, dampak inflasi akan lebih kecil apabila hal tersebut tidak diumumkan lebih dahulu.

Dan tak kalah pentingnya adalah kebijaka pengembangan SDM, tehnologi, penambahan prasarana dan penggalakan investasi baik melalui PMDN maupun PMA.

Penutup

Nampaknya pengendalian inflasi harus dititikberatkan pada sisi penawaran agregat seperti diuraikan diatas. Debirokrasi, deregulasi di sektor riil (produksi, inverstasi dan perdagangan) terus dilanjutkan. Pengendalian permintaan agregat melalui kebijakan moneter fiskal dan kurs yang hati-hati selama ini telah mampu menahan inflasi pada tingkat satu digit. Ekonomi yang memanas yang telah nampat di tahun 1995 dan kemungkinan besar masih akan berlanjut pada tahun 1996 perlu ditanggulangi terutama melalui *supply side policy* dibarengi dengan kebijakan hati-hati di sektor permintaan agregat.

Referensi

1. Seach Jefficy D, and Larrain, Felipe B. *Macroeconomics In The Global Economy*, New Jersey, Pretice Hall, 1993 P. 445.
2. Fischer, Stanley, *Rational Expectation and Economic Policy*, The University of Chicago Press, 1990, P. 65.